



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018**



## **PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

*Alamat Jl. Brigjen Katamso No. 2 Palangka Raya-Kalteng  
Telp/ Fax. (0536) 3220517/ 3229663  
Email : [diskapi.kalteng@gmail.com](mailto:diskapi.kalteng@gmail.com)*

## KATA PENGANTAR

**P**uji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-NYA penyusunan **“Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018”** ini dapat diselesaikan. Penyusunan LKIP ini secara umum merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan strategi pembangunan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang mengarah pada prinsip-prinsip *good governance* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai serta pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan yang telah dilaksanakan di bidang kelautan dan perikanan. Sangat disadari bahwa LKIP ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya dapat memberikan manfaat dan gambaran tentang hasil pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018.

Palangka Raya,      Pebruari 2019  
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Kalimantan Tengah,

**Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196607271993031011

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

### **A. Capaian Kinerja**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mencerminkan suatu organisasi yang akuntabel untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Akuntabilitas kinerja ini lebih difokuskan pada evaluasi kinerja yang bertujuan mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui analisis akuntabilitas kinerja yaitu :

- a. keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan tujuan, misi dan visi;
- b. keterkaitan antara pencapaian kinerja kegiatan dengan pencapaian sasaran.

Arah dan tujuan yang ingin dicapai atau dihasilkan dari pembangunan bidang kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah yang tertuang di dalam dokumen Rencana Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021, yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan produksi perikanan tangkap;
- b. Meningkatkan produksi perikanan budidaya;
- c. Meningkatkan konsumsi terhadap produk hasil perikanan;
- d. Mengoptimalkan pengelolaan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- e. Meningkatkan upaya pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Pelaporan Kinerja bertujuan untuk (a) memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan (b) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Maksud penyusunan LKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah kepada Gubernur Kalimantan Tengah atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dari penyusunan LKIP ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018.

Sebagai wujud dari tahapan dalam pencapaian tujuan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun, maka sasaran yang ingin dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) program utama yang telah ditetapkan dengan berbagai kegiatannya masing-masing yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2018, antara lain meliputi :

- a. Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap, dengan indikator sasaran kinerja Jumlah produksi perikanan tangkap (ton), target 130.526,10;
- b. Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya, dengan indikator sasaran kinerja Jumlah produksi perikanan budidaya (ton), target 97,276,39;
- c. Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya, dengan indikator sasaran kinerja Jumlah produksi benih (ekor), target 61.343.000,00;
- d. Tercapainya Angka Konsumsi Ikan; dengan indikator sasaran kinerja Angka konsumsi ikan (kg/kap/tahun), target 48,10;
- e. Terlaksananya pengelolaan, rehabilitasi, dan konservasi SDKP yang optimal; dengan indikator sasaran kinerja Tersedianya dokumen kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut (dokumen), target 1,00;
- f. Terlaksananya pengelolaan, rehabilitasi, dan konservasi SDKP yang optimal; dengan indikator sasaran kinerja Jumlah luasan konservasi perairan (Ha), target 61.362,00;

- g. Terlaksananya pengelolaan, rehabilitasi, dan konservasi SDKP yang optimal; dengan indikator sasaran kinerja Jumlah luasan rehabilitasi kawasan pesisir (Ha), target 2,50;
- h. Terlaksananya pengawasan pemanfaatan SDKP; dengan indikator sasaran kinerja Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan/ UU yang berlaku (%), target 78,00; dan
- i. Terlaksananya pengawasan pemanfaatan SDKP; dengan indikator sasaran kinerja Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan SDKP (kelompok), target 30,00.

Dari hasil penilaian terhadap 8 (delapan) indikator kinerja utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencapai 5 (lima) sasaran strategis, diperoleh kesimpulan bahwa secara umum kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sangat baik, namun demikian jika dilihat dari angka capaian kinerjanya masih terdapat 2 (dua) indikator dari 8 (delapan) indikator kinerja yang tidak mencapai 100% yaitu pada : Sasaran **Meningkatnya kualitas pengelolaan, rehabilitasi, dan konservasi SDKP** dengan indikator kinerja *Jumlah luasan konservasi perairan (Ha)* tingkat capaiannya sebesar 72,00 % dengan kategori CUKUP (kuning) dan sasaran **Meningkatnya Kualitas Pengawasan SDKP** dengan indikator kinerja *Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan / UU yang berlaku (%)* dengan tingkat capaian sebesar 64,10 %. Hal ini dikarenakan terjadinya perubahan kewenangan pengelolaan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamankan provinsi mengelola wilayah perairan laut.

Prestasi kinerja kategori SANGAT BAIK dicapai pada Sasaran **Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap** dengan indikator *Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)* sebesar **101,49 %**; sasaran **Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya** dengan indikator *Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)* sebesar **100,90 %** dan *Jumlah produksi benih (ekor)* sebesar **101,00 %**; sasaran **Tercapainya Angka Konsumsi Ikan** dengan indikator kinerja *Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)* sebesar **125,11 %**; dan sasaran **Meningkatnya Kualitas Pengawasan SDKP** dengan indikator *Jumlah kelompok masyarakat (Pokmaswas) yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan SDKP (kelompok)* sebesar **170,00 %**.

Sedangkan sasaran IKU lainnya yaitu Sasaran **Meningkatnya kualitas pengelolaan, rehabilitasi, dan konservasi SDKP** dengan indikator kinerja *Jumlah luasan konservasi perairan (Ha)* berada pada kategori BAIK (hijau) dengan capaian sebesar 100,00 %.

## **B. Kinerja Keuangan**

Untuk penilaian kinerja keuangan diukur melalui realisasi keuangan, di Tahun 2018 dimana program dan kegiatan yang menunjang pencapaian strategis semula berjumlah Rp.23.964.868.500,- dan setelah perubahan anggaran berjumlah Rp.24.950.989.500,- atau ada penambahan anggaran sebesar Rp.986.121.000 (4,11 %). Pada akhir tahun anggaran 2018, realisasi keuangan sebesar Rp.23.898.953.692,- (95,78 %).

## **C. Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut**

Permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja selama Tahun 2018, yaitu meliputi :

- a. Proses peralihan kewenangan provinsi yang menangani sektor perikanan laut masih belum ditunjang dengan keberadaan sarana dan prasarana yang memadai, sebagai contoh dari 7 (tujuh) pelabuhan perikanan, terdapat 5 (lima) pelabuhan perikanan yang ditetapkan pemerintah pusat untuk dapat dikelola, dan hanya 2 (dua) diantaranya yang beroperasi cukup baik dengan keterbatasan sarpras yang dimiliki.



- b. Perluasan kawasan budidaya melalui intensifikasi usaha belum maksimal;
  - c. Tingginya harga pakan ikan yang mengakibatkan biaya produksi tinggi, dimana kenaikan harga pakan tersebut tidak diikuti dengan kenaikan harga jual ikan konsumsi sehingga menyebabkan pembudidaya mengalami kerugian, akibatnya banyak pembudidaya yang mengurangi kegiatan usahanya;
  - d. Kualitas benih yang digunakan tidak menggunakan benih unggul sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas yang dihasilkan;
  - e. Masih tingginya serangan penyakit ikan khususnya pada kawasan budidaya keramba di Daerah Aliran Sungai (DAS);
  - f. Terjadinya perubahan musim yang ekstrim sehingga mengakibatkan produksi budidaya ikan menjadi menurun karena banyak benih ikan yang mengalami kematian.
  - g. Lemahnya data perikanan, khususnya untuk data perikanan tangkap.
  - h. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap.
  - i. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
  - j. Pengaruh cuaca yang ekstrim sehingga mengakibatkan gelombang tinggi di laut, dimana mempengaruhi jumlah trip operasi penangkapan.
  - k. Bahan bakar yang mahal, sulitnya mendapatkan BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi bagi nelayan, sehingga mengakibatkan berkurangnya trip penangkapan.
  - l. Jumlah produksi produk olahan hasil perikanan tergantung pada hasil dari produksi perikanan budidaya dan tangkap.
  - m. Keterbatasan modal untuk pengembangan usaha dari para pengolah yang sebagian dari kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
  - n. Keterbatasan sarana dan prasarana pengolah dan sebagian dari industri pengolah masih menggunakan peralatan yang tradisional.
  - o. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan dan biaya operasional penyidik perikanan untuk melakukan sosialisasi dalam rangka pencegahan tindak pidana perikanan oleh masyarakat;
  - p. Kurangnya SDM pengawasan khususnya dari sisi kuantitas.
- Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka upaya tindak lanjut yang akan dilakukan dalam pencapaian target indikator ke depan antara lain :
- a. Sejak 2017, fokus perikanan tangkap adalah rehabilitasi/ pembangunan/ pengembangan pelabuhan perikanan, yaitu dengan dimulainya Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Perikanan Kumai melalui pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kedepannya, penyelesaian Rehabilitasi/ Pembangunan Lanjutan Dermaga Pelabuhan Perikanan Kumai akan terus dikerjakan sampai dengan 2019, sambil tetap menyiapkan kelengkapan dokumen pengembangan/ pembangunan pelabuhan perikanan lainnya.
  - b. Mendorong percepatan operasional unit pelaksana teknis daerah (UPTD).
  - c. Peningkatan kawasan budidaya baru melalui pengembangan kawasan budidaya kolam dan keramba;
  - d. Meningkatkan penyediaan pakan murah melalui pengadaan mesin pakan ikan skala mini kepada kelompok pembudidaya;
  - e. Peningkatan penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) kepada kelompok pembudidaya melalui sosialisasi dan temu usaha, serta menganjurkan pembudidaya untuk menggunakan benih ikan yang telah bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) dari UPTD/UPR.
  - f. Pengembangan usaha pengolahan perikanan skala kecil, pengembangan diversifikasi produk olahan, pameran dan promosi produk hasil perikanan, serta ragam produk olahan bernilai tambah.

- g. Karena dalam pengawasan di laut melibatkan banyak pihak/instansi/lembaga, sehingga diperlukan sebuah koordinasi antar lembaga pemerintah (pembentukan forum pengelola perairan lintas sektoral).
- h. Memperkuat payung hukum pengelolaan (Perda dan sosialisasi Perda).
- i. Penguatan/pembinaan dan pembentukan lembaga pengelola perairan ditingkat masyarakat.
- j. Peningkatan SDM (PPNS) pengawas perikanan dan peningkatan kualitas PPNS yang sudah ada.
- k. Penguatan lembaga adat dan kearifan lokal lainnya.